



Analisis Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara Dengan Distrik Oecussie Negara Republic Demokratik Timor Leste (NRDTL)

Wilfridus Taus¹, Anita Lassa², Nikolaus Uskono³, Maria Yovita⁴

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fisipol Universitas Timor, SMPN 1 Kefamenanu⁴

Email: fridust163@gmail.com, Anitalassa2@gmail.com, nikolaus.uskono@gmail.com, lutimariayovita@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan modal besar berupa investasi yang akan digunakan untuk memperkuat usaha kecil menengah masyarakat di daerah perbatasan. Selain investasi, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi apabila tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan akan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Tujuan penelitiannya untuk Menganalisis Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Daerah Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara Dengan *Distrik Oecussie* Negara Republic Demokratik Timor Leste (NRDTL). Metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan sumber data penelitian ini adalah: data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan di atas peneliti dapat menyimpulkan beberapa point, diantaranya; Upaya masyarakat Bikomi Utara untuk berwirausaha perlu di dukung dan ditingkatkan sebab pendapatan masyarakat selalu, pola perencanaan pembangunan di bidang ekonomi di perbatasan belum menjadi prioritas, dan pola atau cara dan jenis usaha yang telah dilakukan sebelumnya telah dialihkan ke jenis usaha sembako sebab jenis usaha ini dianggap lebih mempercepat perputaran ekonomi.

Kata Kunci: *Pertumbuhan, Ekonomi, Masyarakat*

Abstract

High economic growth requires large capital in the form of investment that will be used to strengthen small and medium enterprises in the border areas. Apart from investment, another factor influencing economic growth is human resources. High population growth if not accompanied by the availability of jobs will cause an increase in the number of unemployed. The purpose of this research is to analyze the economic growth of the people in the border area of North Central Timor Regency with the Oecussie District of the Democratic Republic of Timor Leste (NRDTL). The research method used. This research is descriptive qualitative, while the data sources of this research are: primary data and secondary data. The results of the research and discussion above, researchers can conclude several points, including; The efforts of the North Bikomi community for entrepreneurship need to be supported and increased because people's incomes are always on, the pattern of development planning in the economic sector at the border has not become a priority, and the pattern or method and type of business that has been carried out previously has been transferred to the type of basic food business because this type of business is considered accelerate economic turnaround.

Keywords: *Growth, Economy, Society*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beberapa wilayah perbatasan dengan Negara-negara tetangga berupa daratan maupun lautan, antara lain; Propinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Papua dan Nusa Tenggara Timur, wilayah perbatasan memiliki arti yang sangat penting dan strategis, baik dalam bentuk pertahanan dan keamanan (Hankam), maupun ekonomi, sosial budaya. Karena memiliki peran yang sangat penting dan strategis maka pembangunannya masih terus diupayakan. Sebab wilayah perbatasan merupakan garda depan bahkan sebagai cerminan NKRI secara keseluruhan.

Namun demikian, masing-masing wilayah/daerah perbatasan memiliki karakter sosial budaya dan ekonomi yang berbeda. Meski begitu, secara keseluruhan memperlihatkan adanya fenomena yang sama, yakni adanya interaksi langsung dan intensif antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara tetangga, berupa hubungan-hubungan social budaya (*social cultural*) secara tradisional maupun kegiatan ekonomi modern.

Pelaksanaan pembangunan di perbatasan tidak serta-merta menggunakan pendekatan pembangunan dibidang keamanan (*security approach*) tetapi lebih dari pada itu adalah pendekatan pembangunan di bidang ekonomi, (*economic approach*) sebab pembangunan ekonomi merupakan salah satu prioritas pembangunan non fisik yang dilakukan pemerintah di daerah perbatasan seperti yang telah dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh sebab, pertumbuhan ekonomi perbatasan khususnya merupakan salah satu indikator berhasilnya pembangunan Negara Indonesia. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bersifat sentralistis. Pada tahun 1999 pemerintah mengubah kebijakan dari system sentralisasi menjadi desentralisasi dengan memberlakukan Otonomi Daerah, dengan harapan upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar daerah.

Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan Districk Oecussie Negara Republic Democratik Timor Leste (NRDTL) misalnya, merupakan salah satu daerah perbatasan yang terus berusaha untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusianya. Perkembangan pembangunan perbatasan Kabupten TTU tidak terlepas dari peran pemerintah daerah yang menentukan prioritas pembangunannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam lingkup daerah, salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro, biasanya dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten TTU yang berfluktuatif dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; usaha kecil menengah (UKM), investasi, sumber daya manusia, perkembangan teknologi dan faktor-faktor lain.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan modal besar berupa investasi yang akan digunakan untuk memperkuat usaha kecil menengah masyarakat di daerah perbatasan. Selain investasi, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi apabila tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan akan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja adalah tersedianya berbagai jenis usaha kecil menengah. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat mempersiapkan strategi

pembangunan dan menerapkan kebijakan yang tepat guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Dari uraian di atas, penting untuk dianalisis tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan Distrik Oecusse Negara Republic Demokratik Timor Leste (NRDTL).

Wilayah Perbatasan

Menurut pendapat ahli geografi politik, pengertian perbatasan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *boundaries* dan *frontier*. Kedua definisi ini mempunyai makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang sangat strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Konsep *boundaries* dan *frontier* dari Whittersley yang dikutip Hadiwijoyo (2009. p.39) yakni;

“*Boundary* adalah batas wilayah negara atau perbatasan dimana secara demarkasi letak negara dalam rotasi dunia yang telah ditentukan, dan mengikat secara bersama-sama atas rakyatnya dibawah suatu hukum dan pemerintah yang berdaulat. *Frontier* adalah daerah perbatasan dalam suatu negara yang mempunyai ruang gerak terbatas akan tetapi karena lokasinya berdekatan dengan negara lain, sehingga pengaruh luar dapat masuk ke negara tersebut yang berakibat munculnya masalah pada sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya setempat yang kemudian berpengaruh pula terhadap kestabilan dan keamanan serta integritas suatu negara”.

Pada mulanya, Wu (2001. p.22), membuat perbandingan dalam konteks pembangunan antar negara yang tidak memiliki kesamaan dalam perkembangan pembangunan, misalnya:

“Rencana pengembangan kawasan perbatasan *Tumen River Development Zone* terdapat perbedaan sangat mendasar antara Hongkong dan Shenzhen. Pengembangan kawasan perbatasan berbasis sektor informal antara Polandia dan Jerman dan antara Thailand dan tetangganya berbeda dengan *Euro Region (Uni Eropa)*”.

Suratman (2008.p.6) menguraikan lagi, rencana pengembangan kawasan perbatasan yang terfokus pada 3 hal yaitu: (1) Pengembangan kapasitas kawasan perbatasan; (2) Pembangunan perekonomian perbatasan; (3) Pembangunan sosial budaya perbatasan. Sebagai kekuatan lain untuk melaksanakan semua konsep- tersebut, maka dalam penjabaran Bappenas (2003), mengingatkan kepada para pelaksana pembangunan di wilayah perbatasan untuk mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana di bawah ini:

- a) Mewujudkan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara;
- b) Menyeimbangkan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan pertahanan wilayah negara;
- c) Melindungi sumber daya alam perbatasan melalui pengelolaan wilayah konservasi dan tanaman nasional;
- d) Memberi peran dan kewenangan yang saling mendukung antara pemerintah pusat, Propinsi dan Kabupaten serta antara pemerintah dan swasta;
- e) Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar mendapat manfaat sebesar-besarnya dari upaya-upaya pengembangan wilayah perbatasan;
- f) Meningkatkan kerjasama dengan pihak luar negeri untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, budaya, politik dan pengelolaan sumber daya alam di perbatasan.

Prinsip-prinsip ini, menjadi sesuatu hal yang lebih penting untuk diprioritaskan pada saat pengambilan kebijakan menyangkut pengelolaan atas keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh

pemerintah daerah, sebab berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintah daerah di perbatasan khususnya, memiliki peranan langsung menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan. Pemerintah daerah di perbatasan juga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya, yang meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang tentunya memiliki beragam potensi. Pemikiran ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dideskripsikan oleh Nugroho, dkk (2012, p.368) mengenai potensi-potensi yang ditemukan di wilayah perbatasan yaitu:

“Di wilayah perbatasan ditemukan aspek-aspek sosial ekonomi dan lingkungan sebagai bagian dari konstelasi geograsi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wawasan nasional. Konsekwensinya pemerintah pusat juga harus mengambil peran langsung dalam mendorong kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan menciptakan kesejahteraan. Hal ini makin relevan karena faktor integrasi ekonomi, sosial dan ekologi (lingkungan) dengan negara tetangga menjadi *determinant factor (export driven)* dalam pembangunan wilayah perbatasan. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu menjawab isu dan kebutuhan utama diwilayah perbatasan khususnya infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penegakkan hukum; yang merupakan kendala utama pengembangan”.

Potensi itu kemudian, mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan tentang pengembangan kawasan perbatasan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, baik dari sisi regulasi maupun kegiatan pembangunan. Dari sisi regulasi, pada tahun 2005 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 mengenai pengelolaan pulau-pulau kecil terdepan (terluar) yang mengamanatkan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dalam aspek keamanan, kesejahteraan dan lingkungan. Tahun 2008 telah diterbitkan juga Undang-undang Nomor 43 tentang wilayah negara. Regulasi terbaru ini sebagai payung kebijakan bagi pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan negara secara terpadu, salah satunya mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di tingkat nasional dan daerah. Wanggai (2012. pp.234-235). Pendapat Wanggai (2012. p.233), yang tertera dibawah ini sesungguhnya merupakan inti kesimpulan dari pernyataan di atas mengenai kebijakan pembangunan daerah perbatasan yakni:

“Pada kurun waktu 2004-2009 paradigma pembangunan perbatasan telah diubah oleh presiden SBY. Presiden telah menggeser arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam (*inward looking*), menjadi pembangunan yang berorientasi ke luar (*outward looking*). Tidak hanya urusan pertahanan, namun kita memberikan prioritas pada utusan ekonomi wilayah. Hal ini berarti pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan berjalan paralel dalam satu tarikan langkah”.

Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian pengelolaan perbatasan berdasarkan spirit dan amanah pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Undang-undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, bahwa pengelolaan perbatasan dimaknai sebagai; upaya bagaimana menggerakkan orang-orang dan potensi kawasan perbatasan melalui penetapan kebijakan perencanaan program, penyusunan kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan atas penanganan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan. Atas dasar itu, Tirtosudarmo (2002), yang dikutip oleh Sanak (2012. p.32) menguraikan mengenai pengelolaan

perbatasan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni menempatkan perbatasan sebagai *geographical space* dan sebagai *socio culture space*. Perbatasan menjadi persoalan *socio culture space* ketika fokus bahasanya adalah tentang aspek-aspek kehidupan manusia yang layak.

Pemerintah seyogyanya tidak hanya mengutamakan keamanan teritorial dengan mengarahkan kekuatan militer untuk menjaga perbatasan, tetapi juga perlu melakukan pembangunan di daerah perbatasan secara lebih memadai. Sehubungan dengan itu Silalahi yang dikutip Sanak (2012. pp. 32), mengemukakan bahwa:

“Nasionalisme dan rasa kebangsaan suatu bangsa yang terwujud dalam sikap cinta tanah air dan patriotisme menjadi tumpuan utama strategi keamanan nasional. Rasa kebangsaan dan rasa nasionalisme tersebut tumbuh dan terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin dan terakomodirnya aspirasi masyarakat yang menjadi jiwa dan perekat bangsa untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan”.

Semangat nasionalisme, tidak hanya diterjemahkan secara teoritikal saja namun di butuhkan tindakan dalam bentuk tata pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan partisipatif dari seluruh komponen sebagai bentuk dari roh nasionalisme dan patriotisme di wilayah perbatasan. Hal ini, kemudian Sanak (2012. pp.29-30), memberikan alternatif-alternatif yang mestinya dilakukan yakni:

“Sukses tidaknya pembangunan *human security* di perbatasan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah (*governability*) untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan ketertiban sosial serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu faktor utama yang menentukan sukses tidaknya pembangunan adalah persoalan *governance*. Hubungan antara *governance* yang kuat akan menelurkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik, sebab dalam proses pembangunan yang demikian, rakyat diberi ruang yang luas untuk turut berpartisipasi. Sebaliknya, *governance* yang lemah hanya akan menghasilkan kebijakan yang *state centric*, yang seringkali kurang sesuai dengan aspirasi rakyat”.

Tidak bisa disangkal jikalau alternatif itu akan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan pengelolaan perbatasan sesuai dengan *Grand Design* pengelolaan atas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yakni; (1) Menjaga integrasi NKRI sebagai amanat konstitusi; (2) Membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensif untuk kesejahteraan rakyat; (3) Mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayah perbatasan dalam konteks persaingan global; (4) Disamping pengelolaan batas wilayah Negara, diperlukan pula keberpihakan dan perhatian khusus terhadap upaya pembangunan wilayah-wilayah di sepanjang sisi dalam garis batas, atau kawasan perbatasan, untuk menjamin tetap terpeliharanya kedaulatan negara, keamanan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Hariyadi (2007. p.7) bahwa:

“Dalam konteks politik modern, pengelolaan wilayah perbatasan secara efektif dan terus-menerus dapat dilihat tidak hanya perlu kehadiran simbol-simbol pelaksanaan pemerintahan negara yang bersangkutan tetapi juga sejauh mana politik dan pendekatan pembangunan yang dilakukan di wilayah-wilayah dimaksud dapat dirasakan manfaatnya bagi rakyat setempat dan diakui reputasinya oleh negara-negara lainya. Secara lebih konkrit, Pengelolaan wilayah perbatasan harus digunakan paradigma baru yang menjadikan wilayah perbatasan tidak lagi menjadi pagar belakang tetapi merupakan beranda depan suatu negara. Dengan demikian, dalam pengelolaan wilayah perbatasan, politik pembangunan yang ditempuh dengan paradigma baru tersebut sebagai contoh dapat diwujudkan dengan sejauh mana

Indonesia dapat mendesain sebuah rencana induk pengelolaan perbatasan secara nasional dan terpadu”.

Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Triyono Budi Sasongko dalam seminar “Cetak Biru Pengelolaan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, di Yogyakarta, Rabu 5 Juni 2013, mengatakan:

“Posisi kelembagaan pengelola perbatasan hingga kini masih lemah karena belum ada sistem, kebijakan, dan instrumen pengelolaan perbatasan negara yang terintegrasi, “Sistem perencanaan komprehensif, baik yang bersifat sektoral maupun spasial juga belum tersedia. Telah terjadi parsialitas, di mana kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan banyak tersebar di kementerian dan lembaga,”.

Cara pandang di atas, lebih ditekankan pada pengelolaan perbatasan yang dianggap belum melembaga, namun Nugroho, (2012, pp.369-370) berpendapat lain karena pembangunan wilayah perbatasan secara umum dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Artinya; Pengelolaan daya saing wilayah perbatasan mutlak memerlukan intervensi pengelolaan oleh pemerintah pusat, dengan alasan sebagai berikut:

1. Akselerasi pembangunan ekonomi wilayah perbatasan harus dilakukan sesegera mungkin, agar kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga dapat dikurangi. Kebijakan otonomi daerah dapat menjadi momentum percepatan; atau program-program pembangunan wilayah yang relevan dapat dikembangkan sesuai potensi setempat. Sesuai dengan PP 19 tahun 2010 dan PP 7 tahun 2008, gubernur memiliki wewenang mengkoordinasikan pembangunan dan kerjasama diantara kabupaten/kota untuk memanfaatkan potensi wilayah perbatasan menjadi sumber daya ekonomi untuk menghasilkan produktifitas dan nilai tambah ekonomi wilayah. Akselerasi dilakukan melalui instrumen kemudahan atau insentif kepabeanan, pembangunan infrastruktur dalam arti luas; agar investasi lebih mudah masuk. Pemerintah perlu segera menetapkan kawasan ekonomi khusus (KEK) terhadap wilayah perbatasan tersebut. Alternatif pembangunan agropolitan atau kawasan pembangunan ekonomi terpadu (KAPET) dapat dipilih.
2. Kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat perbatasan harus ditingkatkan melalui proses pembelajaran *entrepreneurship* seluruh SDM (pemerintah, masyarakat dan swasta) agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat madani dalam menjalankan fungsi *good governance*. *Good government* di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat diperlukan karena secara umum di wilayah perbatasan memiliki kerawanan dalam kehidupan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
3. Pembangunan wilayah perbatasan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek konservasi lingkungan. Perlu diidentifikasi dan dikembangkan usaha jasa pemanfaatan alam atau pariwisata alam berbasis nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian pengembangan kemasyarakatan. Sektor ekowisata dikedepankan pada wilayah yang merupakan kawasan konservasi, yang rawan terhadap ancaman kerusakan lingkungan akibat *illegal logging*, pembukaan lahan perkebunan, atau aktifitas *illegal* lain. Potensi pariwisata secara umum sangat besar karena lalu lintas barang, jasa dan orang perbatasan umumnya sangat tinggi.
4. Pemerintah harus mengambil langkah aktif untuk menetapkan garis batas negara dengan negara tetangga. Kepastian garis perbatasan mendorong pengelolaan sumber daya lebih efektif, penegakan

hukum lebih efektif, menjamin kehidupan sosial ekonomi, meningkatkan wawasan kebangsaan, mencegah kerusakan lingkungan dan terpeliharanya kedaulatan NKRI.

Cukup menarik untuk diturunkan di sini tentang pernyataan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Faishal yang dikutip “Entikong” pada kegiatan Pencanangan Perdesaan Sehat yang digelar oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu, dan PT Pertamina tanggal (20/12/2012) di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat bahwa:

“Menurutnya disparitas antar wilayah yang terjadi di wilayah perbatasan amat nyata dan tak bisa disangkal. Daerah perbatasan seharusnya mendapatkan prioritas pembangunan, terutama terkait infrastruktur. “Di perbatasan, terlihat bagaimana daerah kita tertinggal dan negara lain lebih maju,”. Diakui bahwa, pembangunan infrastruktur harus digencarkan di daerah perbatasan. Daerah yang menjadi wilayah terdepan seharusnya ditata dengan baik pula. Pendidikan, kesehatan, ketersediaan energi, seperti listrik, dan air bersih, juga diperhatikan. Namun, karena kondisi wilayah yang berbeda, diperlukan perlakuan khusus untuk setiap daerah tertinggal yang jumlahnya mencapai 183 kabupaten di Indonesia. Pemerintah setiap lima tahun ditargetkan 50 daerah tertinggal terentaskan”.

Terkait dengan itu, Rektor Universitas Hasanudin, Syarifudin (2011) ketika menyampaikan pandangannya melalui Forum Masyarakat Perguruan-Tinggi Pemerhati Pembangunan Perbatasan (F-MP-4) di Yogyakarta, bahwa, ada beberapa point-point penting yang perlu terus disinergikan pengelolaannya, antara lain:

1. Masalah pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan di kawasan perbatasan sangat erat berkaitan dengan masalah kedaulatan bangsa dan negara, kesejahteraan rakyat, perlindungan kepentingan masyarakat perbatasan yang masih tertinggal dan kurang terurus, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Berbagai isu tentang batas wilayah negara dan pengelolaan kawasan perbatasan yang selama ini terjadi masih dianggap sebagai masalah *defence-security* dan *law enforcement*, padahal di era damai dewasa ini permasalahan sudah bergeser ke masalah *prosperiti*, *social-security* dan kesetaraan terhadap akses perekonomian yang kurang perhatian, sehingga berkembang diskursus baru tentang ‘*borderless states*’ dimana aktor-aktor baru non-negara lebih meningkat perannya. Oleh karena itu cara pandang *defence-security* dan *law enforcement* saja jelas harus diubah dengan memperhatikan para aktor non-negara guna menyusun aturan dan acuan yang jelas dalam proses pengelolaan batas wilayah negara dan dalam pengelolaan kawasan perbatasan guna terwujudnya perbatasan sebagai beranda depan negara di masa depan.
2. Wacana perubahan pendekatan baru perlu dikembangkan berdasarkan penelitian dan pengkajian, serta analisis terhadap hasil inventarisasi dan pendalaman informasi tentang berbagai masalah perbatasan di daerah. Lima provinsi perbatasan dapat dijadikan sampel berbagai penerapan kebijakan yang ada berkenaan dengan pengelolaan perbatasan, serta dengan memperhatikan berbagai legal instrumen yang berlaku. Analisis lingkungan strategis, baik nasional, regional, maupun global perlu diperhitungkan, dengan tujuan tersusunnya rumusan arah kebijakan dan upaya-upaya pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Indonesia ke depan.
3. Diawali dengan memperhatikan, memotret, dan menganalisis keadaan kawasan perbatasan dan pengelolaannya saat ini oleh elemen perguruan tinggi yang bekerja sama dengan BNPP, serta oleh tim pengkaji perbatasan dari Provinsi-provinsi perbatasan, seperti Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Timur (Kaltim), Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang

kemudian disintesis dan dianalisis, serta yang difasilitasi oleh BNPP, dapat dijadikan 'second opinion' yang netral bagi pemerintah. Analisis ATHG dilakukan dengan basis teori *boundary making* (Jones, 1945), konsep manajemen perbatasan abad 21 (IBRU, 2010), dan dengan melandaskan pada legal instrument input (Pasal-pasal 18,25A, dan 33 ayat (3) UUD-1945; UU No. 43 tahun 2008; UU No. 26 tahun 2007; UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004; serta berbagai perundang-undangan lainnya yang terkait.

4. Karakter insan akademis di perguruan tinggi (PT) sangat memungkinkan untuk memberikan penilaian objektif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasannya. Namun demikian dalam memanfaatkan peran PT sebagai mitra BNPP kiranya perlu diwadahi secara terorganisir berdasarkan kompetensi masing-masing, serta pengaturan prosedur dan mekanisme penyusunan prioritas riset secara bersama dan transparansi diantara PT yang terhimpun dalam sebuah forum.
5. Persoalannya adalah apa dan bagaimana pokok permasalahan dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasannya yang harus diperdalam oleh PT dalam melakukan risetnya.
6. Dalam konsep ini, sumberdaya manusia (SDM) memiliki peran sentral, kesejahteraan masyarakatnya harus menjadi sasaran utama pembangunan, ruang hidupnya harus terjamin kepastiannya dengan aman dan tenang. Keadaan tersebut memerlukan kehadiran negara secara efektif dan intensif dalam wujud, antara lain tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana energi, air bersih, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, dan informasi. Sehingga diperlukan pemikiran-pemikiran *desainer dan engineering* berbasis komunitas (*settlement*) dan pertumbuhan ekonominya. Inilah tantangan PT yang bekerjasama dengan BNPP, dan yang seyogyanya terhimpun dalam sebuah forum, katakanlah forum masyarakat perguruan-tinggi pemerhati pembangunan perbatasan (F-MP-4).

Lebih lanjut, masalah perbatasan adalah masalah lintas negara yang memerlukan kerjasama antar negara, oleh karena itu pemerintah perlu meninjau ulang (*me-review*) berbagai komisi (kerjasama) perbatasan bersama, baik secara substantif maupun fungsional, sesuai dengan perkembangan jaman dan kepentingan nasional yang dinamis.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan sumber data penelitian ini adalah: data primer dan data sekunder. Fokus penelitian ini adalah: Pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan sub fokus sebagai berikut: Jenis Usaha Kecil Masyarakat (UKM) di Kecamatan Bikomi Utara, pendapatan masyarakat di kecamatan Bikomi Utara

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Usaha Kecil Menengah (UKM)

Bedasarkan data yang diperoleh peneliti, jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Bikomi Utara terdapat berbagai macam jenis usaha, diantaranya; Usaha Kripik, usaha Meubeler, usaha ternak dan usaha tenun ikat. Selengkapnya dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1
Perkembangan Industri Kecil Menengah Kecamatan Bikomi Utara

Kabupaten Timor Tengah Utara

No.	Nama	Desa	Jenis Usaha
1.	Theodora Safe	Sainoni	Penjahit
2.	Sabina Kolo	Sainoni	Obat Tradisional
3.	Nikolas Malafu	Napan	Batu Bata
4.	Fabianus Kono Anunu	Napan	Batu Bata
5.	Alexander Kolo	Sainoni	Meubeler
6.	Paulinus Korbaffo	Sainoni	Meubeler
7.	Theresia Lake	Haumeni	Kripik Pisang
8.	Paulina Kolo	Haumeni	Kripik Pisang
9.	Bertha Bete	Haumeni	Kripik Pisang
10.	Ana Metan	Haumeni	Kripik Pisang
11.	Theresia Abi	Haumeni	Kripik Pisang
12.	Yester Sasi	Haumeni	Kripik Pisang
13.	Kristina Nule	Haumeni	Kripik Pisang
14.	Brensiana Bene	Haumeni	Kripik Pisang
15.	Sabina Kolo	Haumeni	Kripik Pisang
16.	Theris Oni	Haumeni	Kripik Pisang
17.	Yohanes Lake	Baas	Kripik Pisang
18.	Margaretha Sau	Baas	Kripik Pisang
19.	Anastasia Abi	Faennake	Kripik Pisang
20.	Viktoria Nule	Faennake	Kripik Pisang
21.	Maria Abi	Faennake	Kripik Pisang
22.	Magdalena Tasain	Banain B	Kripik Pisang
23.	Maria Kolo	Banain B	Kripik Pisang
24.	Demetrianas Oki	Banain C	Sopi
25.	Elisabeth Bona	Banain C	Tenun Ikat
26.	Patrisia Kefi	Napan	Tenun Ikat
27.	Yosefina Iki	Napan	Tenun Ikat
28.	Maria Ciuz	Napan	Tenun Ikat
29.	Blandina Neno	Napan	Tenun Ikat
30.	Katarina Ase	Sainoni	Tenun Ikat
31.	Lusia Taeki	Napan	Tenun Ikat
32.	Martha Kefi	Sainoni	Tenun Ikat
33.	Maria Baki	Sainoni	Tenun Ikat
34.	Marselina Kefi	Sainoni	Tenun Ikat
35.	Yosefina Ustetu	Sainoni	Tenun Ikat
36.	Maria Sani	Sainoni	Tenun Ikat
37.	Krispina Bait	Sainoni	Tenun Ikat
38.	Sabina Kolo	Sainoni	Tenun Ikat
39.	Martha Abi	Sainoni	Tenun Ikat
40.	Viktoria Eli	Sainoni	Tenun Ikat
41.	Patrisia Kefi	Napan	Tenun Ikat
42.	Blandina Manu	Napan	Tenun Ikat
43.	Yudita Eko	Napan	Tenun Ikat
44.	Engela W.S. Bobo	Napan	Tenun Ikat

45.	Helena AbiINI	Napan	Tenun Ikat
46.	Helena Siki	Napan	Tenun Ikat
47.	Katarina Sila	Banain A	Tenun Ikat
48.	Antonina Kolo	Banain A	Tenun Ikat
49.	Krispina Kolo	Banain A	Tenun Ikat
50.	Emerensiana Suni	Banain B	Tenun Ikat
51.	Margaretha Kolo	Banain	Tenun Ikat
52.	Mars elinus Kau	Banain B	Tenun Ikat
53.	Lince Sapan	Banain C	Tenun Ikat
54.	Magdalena Siki	Sainoni	Tenun Ikat
55.	Katarina Ase	Sainoni	Tenun Ikat
56.	Paulina Abi	Sainoni	Tenun Ikat
57.	Emerensiana	Sainoni	Tenun Ikat
58.	Elisabeth Sasi	Haumeni	Tenun Ikat
59.	Petronela Abi	Sainoni	Tenun Ikat
60.	Brigitha Kolo	Sainoni	Tenun Ikat
61.	Maria Regelinda Said	Sainoni	Tenun Ikat
62.	Martha Kolo	Sainoni	Tenun Ikat

Sumber: Statistik (Perkembangan Industri Kecil Menengah Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2013 s/d 2015).

Data tersebut menunjukkan bahwa ada 62 jenis usaha di kecamatan Bikomi Utara, dan yang paling banyak adalah tenun ikat dengan jumlah 38 jenis usaha, sedangkan usaha kripik pisang ada 16 unit. Kendati demikian, hasil pengamatan serta *survei* yang dilakukan peneliti diketahui bahwa telah terjadi pergeseran atau perubahan jenis usaha di atas ke usaha-usaha sembako, misalnya kios dan lain-lain. Hal ini dilakukan karena menurut analisa dan perhitungan para usahawan, volume perputaran keuangan sangat lamban sementara tingkat kebutuhan masyarakat semakin bertambah, selain itu, lokus pemasaran akan jenis usaha di atas belum tersedia sehingga terdapat kesulitan dalam pemasarannya. Dengan begitu peneliti menampilkan data usaha lain dibawah ini:

Tabel 2
Jenis Usaha Kecil Menengah (UKM) Kecamatan Bikomi Utara Tahun 2016

No.	Nama	Asal Desa	Jenis Usaha
1	Yoseph Kune	Sainoni	Sembako
2	Florentina Oki	Sainoni	Kios
3	Lessa Abi	Sainoni	Kios
4	Regelinda Said	Sainoni	Kios
5	Wenses Talan	Sainoni	Kios
6	Martha Kefi	Sainoni	Kios
7	Agustinus Lake	Sainoni	Kios
8	Lusia Abi	Sainoni	Kios
9	Fransiska Nule	Sainoni	Kios

Sumber: Olahan Peneliti

Tabel.3

Modal	Pendapatan
-------	------------

Rp. 25.000.000	
Rp. 5.000.000	Rp.300.000 s/d Rp.400.000
Rp. 20.000,000	Rp. 200.000
Rp. 2.500.000	200.000
500.000	Rp. 400.000
	6.000.000 s/d Rp.8.000.000

Disimpulkan bahwa; berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di perbatasan masyarakat sudah bisa memanfaatkan kondisi tersebut untuk meningkatkan ekonomi mereka. Hal ini dilakukan karena menurut asumsi bahwa kondisi di daerah perbatasan sangat menjanjikan jika dimanfaatkan secara baik, sebab kondisi lalu lintas orang di perbatasan terbilang cukup tinggi, sehingga masyarakat dituntut untuk lebih kreatif. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa jika masyarakat pandai memanfaatkan situasi ini, tentunya volume dan tingkat pendapatannya semakin meningkat.

Dengan argumentasi tersebut, peneliti memandang bahwa ketika menjalankan satu jenis usaha saja tidak cukup sebab lalu lintas konsumen khusus mengenai usaha bensin terus bertambah sehingga berusaha untuk mendatangkan modal.

Jika dilihat dari keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran masyarakat, masih belum signifikan sebab kebiasaan di kecamatan Bikomi Utara tergolong tinggi.

Setelah peneliti menelusuri lebih lanjut ditemukan 2 macam usaha yang lebih dominan yaitu; Kios dan usaha Bensin eceran, selain masyarakat mencari modal sendiri ada cara lain yang dilakukan untuk berwirausaha, diantaranya adalah mengambil barang jualan dari orang lain dan mereka hanya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan.

3.1. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat di kecamatan Bikomi Utara cukup bervariasi., tidak semua masyarakat melakukan usaha kecil menengah (UKM), karena sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Dengan demikian, ukuran normatif untuk mengetahui pendapatan masyarakat secara keseluruhan masih bervariasi.

Disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan antara Rp. selama satu bulan. Pendapatan seperti demikian, cukup significant bagi kehidupan masyarakat di perbatasan atau dengan kata lain pendapatan masyarakat setiap tahun mengalami peningkatan dan ini menunjukkan kualitas kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik.

Pendapatan; per-hari sekira Rp. 650.000,- Untuk pengeluaran per-bulan Rp. 1050. 000,-

Jika dihitung secara matematik diketahui bahwa: pendapatan Riil perbulannya Rp. 600.000+Rp.50.000= Rp.650.000 x 30 hari = Rp.19.500.000,- , kemudian di kurangi dengan pengeluaran diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000,- , jadi, pendapatan sebesar Rp. 14.000.000,- , setiap bulan.

Jika dihitung pendapatan per-bulan; Rp. 400.000x30 hari= 12.000.000,- kemudian dikurangi dengan biaya transportasi seperti; Rp. 90.000,-x 4 minggu = Rp. 360.000,- , hal ini meyakinkan peneliti bahwa tentu ada biaya atau pengeluaran lain misalnya; biaya rumah tangga, dan biaya tak terduga lainnya sehingga untuk keuntungan riilnya bisa mencapai Rp. 5.000.000,- per-bulan.

Jadi volume pendapatannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya oleh karena banyaknya pengusaha atau usahawan di sekitar wilayah perbatasan sehingga tingkat pendapatan tidak berubah naik seperti yang diharapkan sebelumnya, penjelasan ini kemudian di hitung secara matematik diketahui bahwa; untuk pendapatan per-hari Rp. 500.000x30 hari=Rp.15.000.000,- dikurangi dengan kebutuhan lain seperti transportasi Rp. 30.000x4=120.000 dan kebutuhan rumah tangga Rp. 500.000 serta kebutuhan tak terduga diperkirakan Rp. 1.000.000,- sehingga total pendapatan/keuntungan perbulan Rp. 5.000.000,- tidak termasuk belanja modal. *Pendapatan 1 hari bisa mencapai Rp. 200.000,- s/d 300.000,-*, *“Keuntungan per-hari berkisar antara Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,-*, *“Pendapatan per-hari sebesar Rp.300.000,- s/d Rp.400.000,- lalu biaya transportasi untuk belanja barang Rp.25.000,- 2 kali dalam seminggu dan juga kebutuhan sekolah sebesar Rp.900.000,- per-bulan”..*

Oleh karena itu, peneliti merumuskan cara perhitungan yang sama agar mendapatkan hasil; misalnya; Pendapatan Rp. 300.000,- x 30 hari=Rp.9.000.000,-, kemudian dikurangi dengan pengeluaran atau biaya lain-lain seperti kebutuhan sekolah Rp. 900.000,- dan belanja barang Rp. 50.000,- x4=Rp. 200.000,- jadi Rp. 9.000.000,- kurang Rp. 1.100.000,- = Rp. 7.900.000,-.

Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Pendapatan Masyarakat

Bedasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh, sebagian masyarakat di kecamatan Bikomi Utara disamping berprofesi sebagai petani mereka berniat untuk menambah pendapatan melalui usaha. Disamping itu, masyarakat melihat tentang perputaran keuangan. Dengan begitu, masyarakat membuka usaha Kios (Jualan sembako) dan Bensin (Bahan Bakar minyak) disekitar itu. Bahkan ada yang merubah jenis usaha *tenun ikat* menjadi usaha Kios (menjual sembako). Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktifitas perekonomian menghasilkan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, artinya perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap pembangunan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Demikian pula pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi penting untuk dilihat perkembangannya karena masyarakat di perbatasan akan mencitrakan reputasi bangsa dan negara.

Argumentasi ini jika ditinjau dari perspektif pertumbuhan ekonomi masyarakat paling tidak dalam proses perencanaan pembangunan mestinya melihat ratio tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Oleh karena menjadi tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan dimaksud, peneliti menampilkan pertumbuhan ekonomi di perbatasan Kecamatan Bikomi Utara.

Tabel 4
Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan Kabupaten TTU

No.	Kecamatan	2008	2009	2010
1.	Miomaffo Barat	3,55	5,78	5,75
2.	Musi	6,13	5,61	5,62
3.	Mutis	6,05	5,69	5,68

4.	Bikomi Tengah	2,90	5,72	5,74
5.	Bikomi Nilulat	4,88	5,69	5,62
6.	Bikomi Utara	5,38	5,68	5,68
7.	Naibenu	5,30	5,90	5,83
8.	Insana Utara	3,94	5,49	5,70
Jumlah		4,77	5,70	5,70

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, Tahun 2012

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2008 sampai tahun 2010 pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan. Kondisi saat itu jika dibandingkan dengan sekarang (tahun 2016), pertumbuhan ekonomi di kecamatan Bikomi Utara, volume pendapatannya mengalami peningkatan, oleh karena itu sistem *bottom up planning* mestinya menjadi perhatian serius agar para perencana pembangunan mengetahui secara jelas indikator keberhasilan. Oleh sebab, hasil penelitian di atas semakin menguatkan peneliti untuk mengungkapkan bahwa secara faktual volume pendapatan masyarakat yang berwirausaha mengalami peningkatan secara cepat. Apabila hal ini tidak diabaikan maka segala indikator-indikator ekonomi masyarakat dapat diketahui seperti yang diuraikan oleh Kasnawi dalam Amien (1996. p. 155) mengenai indikator sosial ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung mengukur tingkat pemenuhan dasar masyarakat, seperti: keadaan perumahan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, kesempatan kerja dan aksesibilitas ke fasilitas pelayanan umum dan sumber-sumber informasi. Dijelaskan pula bantuan dari pemerintah daerah berupa proyek maupun anggaran pembangunan bagi pemerintah kecamatan paling tidak harus mempertimbangkan indikator serta dampak pertumbuhan dan akibat timbal balik dari obyek pembangunan, sehingga dengan besarnya anggaran tersebut tidak menjadi sia-sia.

Pada situasi yang lain, tingkat kesadaran masyarakat untuk berwirausaha semakin tinggi sehingga masyarakat sudah tidak takut menghadapi tantangan kemiskinan. Kendati demikian, pemerintah daerah serta para *stakeholder* harus tetap terus mendorong semangat wirausaha melalui pola perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif sehingga berbagai macam potensi yang ada di perbatasan bisa di kembangkan demi kehidupan masyarakat, seperti pernyataan Nugroho, dkk (2012. p.368) mengenai potensi-potensi yang ditemukan di wilayah perbatasan yaitu: “Di wilayah perbatasan ditemukan aspek-aspek sosial ekonomi dan lingkungan sebagai bagian dari konstelasi geograsi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wawasan nasional. Konsekwensinya pemerintah pusat juga harus mengambil peran langsung dalam mendorong kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan menciptakan kesejahteraan. Hal ini makin relevan karena faktor integrasi ekonomi, sosial dan ekologi (lingkungan) dengan negara tetangga menjadi *determinant factor (export driven)* dalam pembangunan wilayah perbatasan. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu menjawab isu dan kebutuhan utama diwilayah perbatasan khususnya infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penegakkan hukum; yang merupakan kendala utama pengembangan”.

Masyarakat akan terus berupaya dengan segala keterbatasan untuk keluar dari kemiskinan., disadari bahwa kehidupan mereka merupakan cerminan bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, saat ini dan kedepan dibutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah dalam rangka menunjang serta meningkatkan kehidupan masyarakat. Cukup menarik, setelah peneliti

mengetahui persis kapasitas sumber daya manusia sebab rata-rata tingkat pendidikan masyarakat masih dibawah standar.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas peneliti dapat menyimpulkan beberapa point, diantaranya; Upaya masyarakat Bikomi Utara untuk berwirausaha perlu di dukung dan ditingkatkan sebab pendapatan masyarakat selalu meningkat, pola perencanaan pembangunan di bidang ekonomi di perbatasan belum menjadi prioritas, pola atau cara dan jenis usaha yang telah dilakukan sebelumnya telah dialihkan ke jenis usaha sembako sebab jenis usaha ini dianggap lebih mempercepat perputaran ekonomi. Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain: Pemerintah daerah mestinya menggunakan pendekatan pembangunan ekonomi (*economic approach*) di daerah perbatasan sehingga jiwa kewirausahaan bagi masyarakat di perbatasan semakin di tingkatkan, bahkan metode tersebut akan merubah *mindset* ke arah *entrepreneurship*. Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan bantuan kepada masyarakat berupa melegalisasikan lembaga simpan pinjam yang akan dijadikan sebagai modal usaha bagi masyarakat, Masyarakat Bikomi Utara terus meningkatkan jiwa wirausaha agar pola hidupnya bisa berubah. Selain itu, masyarakat mestinya mengurangi kebiasaan-kebiasaan atau tradisi pesta/adat istiadat yang menghabiskan anggaran yang lebih besar. Bagi masyarakat yang tidak melakukan usaha, perlu dibekali dengan keterampilan lain agar bisa memanfaatkan keterampilan itu untuk menambah pendapatannya, Kepada peneliti lain agar mendalami masalah yang sama di kecamatan Bikomi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Caporaso James A. David.2008.Teori-Teori Ekonomi Politik.Cambridge University Press.
- Data Statistik (Perkembangan Industri Kecil Menengah Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2013 s/d 2015).
- David Halper. 2005. Social Capital.Polity Press. USA
- Erani Ahmad Yustika.2012.Ekonomi Kelembagaan (Paradigma, Teori dan Kebijakan). Erlangga. Kecamatan Dalam Angka, Tahun 2012
- Setiawan, Ary. 2013. E-Jurnal; Analisis Perbandingan Pembangunan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (*Studi Komparatif Pembangunan Perbatasan Sebatik-Tawau*). Samarinda. Universitas Mulawarman.
- Todaro, Mikhael. 1985. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Bandung. Yudistira.
- UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
- Yanuar Ikbar. 2006.Ekonomi Politik Internasional (Konsep dan Teori). PT.Refika Aditama.